



# Bentuk Tim Percepatan Penuntasan Masalah Aset

**SINGKAWANG** -- Guna menuntaskan persoalan aset, Pemerintah Kota Singkawang telah membentuk tim inventarisasi. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Singkawang, Muslimin mengatakan, tim ini melibatkan semua OPD terkait, termasuk camat, lurah dan ATR/BPN Kota Singkawang.

"Yang salah satu tugasnya adalah menginventarisir, mengidentifikasi serta memproses pensertifikatan aset-aset hasil penyerahan dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang," kata Muslimin, Senin.

Dimana total aset yang diserahkan itu ada sebanyak 228 aset."Tim ini sudah bisa mulai bekerja secara efektif terhitung minggu depan dan akan dievaluasi setiap bulan oleh Wali Kota Singkawang," ujarnya.

Dia berharap, setiap bulan ada perkembangan mengenai

aset, dan pada akhir tahun akan di evaluasi secara menyeluruh. Kemudian, mengenai permohonan sertifikasi aset yang diajukan Pemkot Singkawang dari hasil pengadaan masing-masing OPD atau melalui BKD ke BPN yang memerlukan waktu yang cukup lama, akan dibahas dan didalami dalam tim sehingga semua persyaratan administrasi dan fisik di lapangan dapat diselesaikan.

"Mengingat persil aset Pemkot Singkawang belum seluruhnya selesai pada proses sertifikasinya," ungkapnya. Sekarang ini, pihaknya sedang memprioritaskan untuk balik nama sertifikat aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan oleh BPN Singkawang.

"Dari total aset sebanyak 228 ini, setelah kami telaah dan teliti, ada beberapa persil yang masih perlu kami minta

penjelasan kepada Pemkab Sambas dan BPN terutama terkait tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan oleh Pemkab Sambas kepada pihak ketiga dengan status hak pakai dan hak guna bangunan atau tanah yang masih berstatus hak guna bangunan (HGB) diatas tanah HPL," jelasnya.

Selain itu, dari total aset yang akan diserahkan, dugaan sementara (walau masih perlu kami minta informasi dan klarifikasi dari Pemkab Sambas) karena ada beberapa persil tanah yang masuk dalam daftar aset yang diserahkan, namun sudah beralih hak kepemilikannya yang dilakukan pada saat transisi pemekaran Kabupaten Sambas, Bengkayang dan pembentukan Pemkot Singkawang tahun 2001.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Sigit

Bintoro sebelumnya mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 228 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan yang akan diserahkan Pemkab Bengkayang ke Singkawang. "Belum selesainya permasalahan aset antara Singkawang dan Bengkayang tak hanya berdampak pada LHP Keuangan daerah Kota Singkawang saja, tapi juga secara dokumen Singkawang tidak punya bukti yang kuat atas kepemilikan aset tersebut," katanya. Karena, katanya, belum diteruskannya dokumen itu maka kita belum mengetahui secara legalitas jika aset itu merupakan milik Singkawang.

Menurutnya, penyerahan aset yang belum dilakukan adalah penyerahan secara dokumen. Karena penyerahan dokumen ini harus dilengkapi oleh para pejabat yang akan bertandatangan.

"Selama ini, kesiapan para

pejabat yang bertanda tangan selalu tak sinkron. Yang mana pejabat Singkawang siap, tapi pejabat Bengkayang tidak siap. Begitu juga sebaliknya, sehingga penyerahan aset secara dokumen belum bisa dilakukan sampai hari ini," ujarnya.

Secara terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, dirinya optimistis bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan daerah Kota Singkawang. "Tepat enam bulan saya dilantik, tentunya apa yang menjadi target (salah satunya WTP, red) harus menjadi prioritas," katanya. Sehingga, setiap dinas sudah dirinya tegaskan untuk bekerja dengan maksimal agar bisa meraih predikat tersebut. "Artinya, apa yang sudah menjadi temuan BPK itu harus bisa ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya. (har)